

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No.1 Komplek PIK Menteng Medan – 20228

Telp : 061 – 7882200, Fax : 061 – 7850800

Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com. Website : bpbd.pemkomedan.go.id

Medan, 7 Agustus 2024

Nomor : 000.7.2.6/ 1887
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pengiriman RENJA PD Tahun 2025


Yth. Kepala BAPPEDA Kota Medan 7/8/24.
Di
Medan

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor :000.7.2.6/5415 tanggal 29 Juli 2024 Hal : Penyampaian Rancangan Akhir Dokumen Renja PD Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami kirimkan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (terlampir).

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Medan


Yunita Sari, S.H
Pembina/(IV/a)
NIP 197006222007012031



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rencana kerja pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:

BAB I	: PENDAHULUAN.
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB VII	: PENUTUP.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2025 yang antara lain didalamnya mengatur arah kebijakan perekonomian dan isu-isu strategis pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (3) RKPD selanjutnya menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan memutakhirkan rencana kerja Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENYUSUNAN KUA, PPAS, DAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS di DPRD; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam hal RKPD Tahun Anggaran 2025 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen RKPD Tahun 2025 yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 5 Juli 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 5 Juli 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP 197006222007012031

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Laporan Rancangan Kerja Tahun 2025 (RENJA) Tahun Anggaran 2024. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah instansi Pemerintah Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang penanggulangan bencana.

Oleh karenanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan berpengaruh dari kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ada, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus juga tercermin dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan berkewajiban untuk menyusun Rancangan Kerja Tahun 2025.

Penyusunan RENJA ini penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, berisikan Rancangan Kerja selama satu tahun ke depan, sehingga dapat menjadi Acuan Program dan Kegiatan selama satu Tahun.

Akhir kata, semoga Rancangan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam proses pembangunan Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 19

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 34

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46

BAB. V. PENUTUP 48

5.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan 48

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 49

5.3 Rencana Tindak lanjut 49

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2025 adalah Panduan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan untuk Satu Tahun. Rencana Kerja ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026 sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi Pembangunan, serta Visi Misi Wali Kota Medan sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum urusan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- f. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- g. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembanguana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.;
- h. Permendagri Nomor 100 Tahun 2028 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- i. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Satandar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- l. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang RPJMD Perubahan;
- m. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana;
- n. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Walikota Medan Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024;
- p. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
- q. Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Nomor 000.7.2.2/1139 Tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- 1. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota di Bidang Penanggulangan Bencana yang memuat tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
- 2. Memberikan arah pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
- 3. Sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.
- 4. Sebagai komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan khususnya pada agenda prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

b. Tujuan

1. Mendukung program Wali Kota Medan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Medan
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Kota agar lebih terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan perencanaan dan penganggarannya.
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
4. Meningkatkan kualitas Penanggulangan Bencana yang transparan dan akuntabel.
5. Sebagai instrumen koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

A. Bab I : Pendahuluan

- 1.1 : Latar Belakang
- 1.2 : Landasan Hukum
- 1.3 : Maksud dan Tujuan
- 1.4 : Sistematika Penulisan

B. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 : Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 : Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

C. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 : Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 : Program dan Kegiatan

D. Bab IV : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

E. Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyelenggaraan urusan di bidang penanggulangan bencana daerah selama kurun waktu tahun 2023 diimplementasikan ke dalam prioritas program dan kegiatan pokok sebagai berikut :

I. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja Kegiatan dapat terpenuhi nya indikator Kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penanggulangan Bencana.

- Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Sub kegiatan ini menetapkan Tersedianya pelayanan informasi dan edukasi rawan bencana kota selama setahun dengan target 2 Urusan Komponen yang terdiri dari Sosialisasi Tatap Muka Dengan Penduduk Rawan Bencan, Sosialisasi 5 sekolah. Ralisasi Pelaksanaan 2 Komponen Kegiatan sosialisasi. Sehingga capaian untuk sub kegiatan ini ($\frac{1000}{1000} \times 100\% = 100\%$).

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Capaian Kinerja kegiatan sesuai target 1 kegiatan, dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penanggulangan Bencana.

- Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja peserta pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target peserta 100 orang, yang menghadiri sosialisasi sebanyak 100 orang. ($\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja Terlaksananya Kegiatan Early Warning System (Sistem Peringatan Dini). ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi. Realisasi Kinerja Terlaksananya Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Realisasi Kinerja Tersedianya Jumlah Peralatan Perlindungan yang dibutuhkan Saat Terjadinya Bencana ($6/6 \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi Kinerja Terlaksananya Kegiatan Peduli Deli. ($1/1 \times 100\% = 100\%$)
- Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan kapasitas sebanyak 65 orang dari target 85 orang peserta TRC. ($85/85 \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Realisasi Kinerja Jumlah Warga/Orang Yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Bencana Di Daerah Rawan Bencana ($100/100 \times 100\% = 100\%$)

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Capaian kinerja kegiatan dengan target 100%, dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative “sesuai” karna capaian hanya 82% dari Program Penanggulangan Bencana.

- Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja terlaksananya respon cepat darurat bencana kabupaten/kota tersedianya Petugas Posko Siaga Bencana. Capaian Kinerja untuk sub kegiatan ini tercapai 100 %.
- Sub Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja Pemenuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini ($244565/11.510 \times 100\% = 21,24\%$)

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Capaian kinerja Kegiatan Sesuai dengan Target 1 Kegiatan , dikatakan bahwa pelaksana kegiatan dinyatakan relative “sudah sesuai” dengan target kinerja program Penanggulangan Bencana.

- Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Realisasi Kinerja Terlaksanya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tersedianya Bahan Baku untuk Masyarakat yang tertimpa bencana. ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja terlaksananya Kegiatan sesuai target 100 %, dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya Gaji PNS. Capaian Kinerja untuk Sub Kegiatan ini tercapai 1 tahun.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja terlaksananya kegiatan sesuai target 100%, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, terlaksannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Capaian Kinerja untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs. Realisasi Kinerja terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi Pegawai BPBD. Capaian Kinerja untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$)

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Kegiatan sesuai target 1 tahun terlaksana dengan baik, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana selama 12 bulan. Capaian Kinerja Untuk Sub kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebagai keperluan kantor selama 1 tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Terlaksana selama 12 bulan. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Realisasi Kinerja Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan sebagai keperluan kantor selama 1 tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai keperluan kantor selama 1 Tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$)

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja sesuai dengan Target Kegiatan 73%, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Realisasi Kinerja Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagai sarana dan prasarana kebutuhan kantor sebanyak 39 unit. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Realisasi kinerja terlaksananya Pengadaan Mebel sebagai Sarana dan Prasarana kebutuhan Kantor sebanyak 51 unit. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{51}{11} \times 100\% = 46\%$).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja Kegiatan Sesuai Target 100 % , dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kebutuhan Kantor sebanyak 4 Jenis Laporan. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($4 / 4 \times 100\% = 100\%$)
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk 85 Pegawai PHL. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ($85/85 \times 100\% = 100\%$)

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Sesuai Target 100 % , dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Realisasi Kinerja Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 26 unit Kendaraan Dinas. Capaian Kinerja Untuk Sub kegiatan ini ($26/26 \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Realisasi Kinerja Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini 100 %
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi Kinerja Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Gedung kantor selama 1 tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($1/1 \times 100\% = 100\%$)

TABEL T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perubahan Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingk at Realis asi (%)		Realis asi Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun berjal an (tahun 2024)	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(10/ 4)
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 orang/bulan	70 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	100%	35 orang/bulan	140	67%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Yang Terpenuhi	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	4	67%
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	572 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	124 orang	324	57%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4	67%

1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 paket	4	67%
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	4	67%
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4	67%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	4	67%
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	0	4 Laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	8	50%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%

1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 unit	0 unit	51 unit	51 unit	100%	0 unit	51	100%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	156 unit	39 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	117	75%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Penyediaan Jasa Penunjang urusan yang terpenuhi	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	0	4 Laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	8	50%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	0	4 Laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	8	50%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%

1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104 unit	0 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	52	50%
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4	67%
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	159 unit	106 unit	53 unit	53 unit	100%	0 unit	159	100%
1	05	01	2.09	0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang di pelihara	159 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	53 unit	53	33%
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%

1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota yang diberikan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	4	67%
1	05	03	2.01	0001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kajian risiko bencana kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1	100%
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5500 orang	1500 orang	1000 orang	1000 orang	100%	1000 orang	3500	64%

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	4	67%
1	05	03	2.02	0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	1	100%
+1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	400	67%
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	6 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Laporan	4	67%

1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1169 unit	429 unit	333 unit	333 unit	100%	156 unit	918	79%
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah kawasan yang mendapatkan penguatan kapasitas untuk pecegahan dan kesiapsiagaan	13 Kawasan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0%	3 Kawasan	6	46%
1	05	03	2.02	0000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	2	100%
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	470 orang	65 orang	85 orang	85 orang	100%	85 orang	235	50%
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokum en	2	50%

1	0 5	0 3	2.0 2	00 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	3200 orang	100 orang	1000 orang	100 0 orang	100%	100 0 orang	2100	66%
1	0 5	0 3	2.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	600%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	67%
1	0 5	0 3	2.0 3	00 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokum en	0	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 dokum en	2	50%
1	0 5	0 3	2.0 3	00 09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	9091 30 orang	650 51 orang	2445 65 orang	115 10 orang	5%	115 10 orang	88071	10%

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2	50%
1	05	03	2.04	0010	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T.C. 30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN**

N o	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET RENJA BPBD		REALISASI CAPAIAN
		2023	2024	2023
1	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100	100	100
2	Cakupan Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tersampaikan ke Masyarakat	100	100	100
3	Nilai SAKIP	63,25	63,35	63,15

Dari evaluasi kinerja diperoleh beberapa penjelasan secara rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka strategi daya dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator, input, output dan outcomes.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator

- a. Cakupan Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tersampaikan ke Masyarakat;
 1. Pembuatan dokumen Rencana Kontinjensi. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau

yang belum tentu tersebut. Dokumen Kontijensi yang akan dilaksanakan BPBD adalah Rencana Kontijensi Penanganan Banjir Kota Medan.

2. Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana pada Anak-anak Sekolah, yang dilaksanakan di 5 Sekolah baik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Rawan Bencana
 3. Sosialisasi Tatap Muka dengan Penduduk Daerah Rawan Bencana.
 4. Pemasangan Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) dilaksanakan pada 2 titik sungai kelanjutan dari Tahun Sebelumnya
- b. Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1. Petugas Yang gercep tiba dilokasi kejadian bencana paling lama 15 menit untuk melakukan Kaji Cepat di Lapangan
 2. Data Jumlah Korban Bencana Berdasarkan Korban Meninggal, Luka - Luka, Dan Terdampak (Seminimal Mungkin Atau Nihil Korban) dengan Pendataan dari Tim Kaji Cepat diLapangan.
- c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah di peroleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dengan Realisasi 63.15 B
1. Perencanaan Kinerja
 2. Pengukuran Kinerja
 3. Pelaporan Kinerja
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, sebagai berikut :

1. Wabah Covid-19 yang masih melanda Indonesia.
2. Peningkatan Koordinasi Pentahelix Bencana dalam Penanganan Bencana di Kota Medan, yakni Partisipasi Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media.
3. Tuntutan masyarakat dalam pemenuhan segera kebutuhan logistik bencana

4. Pendangkalan dan abrasi sungai-sungai yang mengalir ke sungai Deli serta belum optimalnya fungsi bangunan pengendali banjir.
5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dibidang Perpustakaan dan Kearsipan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang kurang professional.

BPBD Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menjalankan visi dan misi Pemerintahan Kota Medan, dengan menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata. Misi Kota Medan yang menjadi fokus utama BPBD Kota Medan terkait penanggulangan bencana adalah pada misi nomor 4, yaitu Medan Membangun, membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar tercipta lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM. Dalam misi Medan membangun, BPBD mendukung pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya pengurangan risiko bencana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Masalah bencana banjir termasuk salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur Kota Medan yang menjadi isu strategis Pembangunan kota medan. BPBD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi. Dengan ikut serta berperan dalam program Medan Tanpa Banjir (Tajir) seperti revitalisasi sungai-sungai di kota medan dan pembangunan tanggul anti banjir rob diharapkan dapat mengurangi banjir di beberapa daerah di Kota Medan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada saat penyusunan RKPD tahun 2024, nomenklatur perencanaan anggaran yang digunakan masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan analisis kebutuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 yang dilakukan pemutakhiran

menjadi 2 program 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Adapun yang membuat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut.

1. Review Rancangan Awal dengan Pagu Rp. 21.217.123.424,- sedangkan Hasil Analisis Kebutuhan dengan Pagu Rp. 25.124.821.644,-

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kota Medan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Medan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1000 Orang	Rp 338.349.253	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Medan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	Rp 465.762.670

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Medan	Jumlah Dokumen Rencana kontinjensi yang DiLegalisasi	1 Dokumen	Rp 362.842.500	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Medan	Jumlah Dokumen Rencana kontinjensi yang DiLegalisasi	1 Dokumen	Rp 383.550.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3 Kawasan	Rp 252.992.597	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	Rp 362.982.200
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	Rp 761.902.045	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	Rp 416.600.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Medan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis	Unit	Rp 307.973.796	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Medan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana	Unit	Rp 359.947.925

			ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya					di kawasan tempat tinggalnya		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Medan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	Rp 84.557.806	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Medan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	Rp 308.532.100
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	85 Orang	Rp 305.990.570	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	85 Orang	Rp 327.622.565
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Medan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	Rp 257.889.451	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Medan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	Rp 196.449.750
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Kota Medan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	Rp 128.328.250	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Kota Medan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	Rp 75.183.490
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	1 Dokumen	Rp 1.371.959.760	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	Dokumen	Rp 1.491.696.000

			berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					Dokumen Laporan Kaji Cepat		
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen Rencana Operasi yang sah/legal	1 Dokumen	Rp 298.200.000	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen Rencana Operasi yang sah/legal	1 Dokumen	Rp 333.550.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas Perangkat Daerah yang memiliki Kemampuan Penanganan Keadaan Darurat dalam Aspek Manajerial dan Teknis	124 Orang	Rp 264.237.100	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas Perangkat Daerah yang memiliki Kemampuan Penanganan Keadaan Darurat dalam Aspek Manajerial dan Teknis	124 Orang	Rp 258.523.750
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang (Asumsi)	Rp 1.123.825.132	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang (Asumsi)	Rp 1.186.787.640
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				

	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Rp298.200.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Rp212.246.730
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Rp 401.815.340	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Rp 724.871.800
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Rp 298.200.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Rp 399.298.100
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ Bulan	Rp 7.503.994.990	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ Bulan	Rp 9.998.944.36 9
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp 252.435.360	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Rp 439.504.800
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	124 Orang	Rp 135.287.945	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Rp 113.353.440
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 10.547.147	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 10.275.956
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 26.997.830	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 33.256.919
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 79.552.926	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Rp 73.038.045

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang di Sediakan	1 Paket	Rp 52.660.659	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang di Sediakan	1 Paket	Rp 80.399.055
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 661.578.745	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 874.749.440
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	39 Unit	Rp 491.774.978	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	39 Unit	Rp 533.384.370
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	4 Laporan	Rp 200.918.290	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	4 Laporan	Rp 320.450.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang di Sediakan	4 Laporan	Rp 3.851.332.364	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang di Sediakan	Laporan	Rp 3.644.457.900

10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya	Unit	Rp 811.252.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya	Unit	Rp 970.610.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Rp 201.916.170	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Rp 424.975.590
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Rp 79.610.220	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Rp 103.817.040

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengacu dan berpedoman kepada Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sisitem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pearaturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah maka proses perencanaan, pemograman dan penganggaran urusan penanggulangan bencana dilakukan dengan pendekatan partisipatif,bottom up dan top down planning. Mekanisme Partisipatif diwadahi oleh Musrenbang Kota Medan baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota maupun tingkat propinsi dan nasional. Selanjutnya proses perencanaan tersebut dituang kedalam Rencana Kerja OPD, KUA/PPAS TA 2025 dan APBD/P.APBD Kota Medan TA. 2025.

Usulan Program dan kegiatan BPBD Kota Medan dapat dilihat dari Tabel T.C.32.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Daerah Kota Medan

No	Prioritas Daerah	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Permasalahan	Alamat/ Detail Lokasi	Volume / Anggaran	SKPD Tujuan
1	Sosialisasi Rawan Bencana Kepada Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kecamatan Medan Selayang	Sosialisasi rawan bencana kepada masyarakat	Perlu Diadakan Sosialisasi tentang rawan Bencana	Jl SD Inpres, Kelurahan Asam Kumbang	30 orang / Paket / 100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan
3	Sering Terjadinya Banjir	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kecamatan Medan Helvetia	Peralatan Sistem Peringatan Dini dan	masyarakat yang rawan bencana	Kelurahan Helvetia Timur	2 titik / Paket / 200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pemasangannya (early warning system)					
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan untuk daerah rawan bencana banjir untuk di lingkinhgan 7,8,9,10,11 dAN 12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kecamatan Medan Maimun	Pengadaan Perahu Karet	Masyarakat di Kelurahan Sei Mati	Jl. B. Katamso No 370	10 unit / 30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak .
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 Tujuan dan sasaran BPBD sudah menyesuaikan dengan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan :

Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efektif Serta Terwujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana

Sasaran :

1. Terselamatkannya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Terpenuhiya Kebutuhan Korban serta Terlaksananya Pemulihan Pasca Bencana
2. Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 penyusunan anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Berdasarkan analisis kebutuhan rencana Program dan Kegiatan dalam Kegiatan Musrenbang Kota Medan mengusulkan Pagu Sebesar Rp. 21.217.123.424, dari Pagu Rancangan Awal berdasarkan Dokumen Renstra Sebesar Rp. 40.022.354.499 Sebagai berikut:

a. 2 Program

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. 10 Kegiatan

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

c. 30 Sub Kegiatan

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Utara/ Kota Medan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cacatan Penting	Perkiraan Maju 2025 (Musrenbang)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	05	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	05	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	36 orang/ Bulan	7.503.994.990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 orang/ Bulan	7.579.034.940

1	05	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	05	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Medan	1 Paket	252.435305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	254.959.714
1	05	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan	124 orang	135.287.945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 orang	136.640.824
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	1 Paket	10.547.147	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10.652.619
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan	1 Paket	26.997.830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	27.267.809
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan	1 Paket	79.552.926	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	80.348.455

1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan	1 Paket	52.660.659	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	53.187.265
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	4 Laporan	661.578.745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	668.194.532
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Medan	39 unit	491.774.978	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39 Unit	496.692.728
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan	4 Laporan	200.918.290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	202.927.473
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	4 Laporan	3.851.332.364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	3.889.845.687

1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Medan	26 unit	811.252.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 unit	819.364.722
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	38 unit	201.916.170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 unit	203.935.332
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan	1 unit	79.610.220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	80.406.322
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Medan	1000 orang	338.349.253	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 orang	341.732.745
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Medan	3 kawasan	252.992.597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Kawasan	255.522.523
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Medan	1 Laporan	761.902.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	769.521.065

1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kota Medan	300 unit	307.973.796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 unit	311.053.533
1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Medan	3 Kawasan	84.557.806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Kawasan	85.403.384
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Medan	85 orang	305.990.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 orang	309.050.475
1	05	03	2,02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kota Medan	1 Dokumen	362.842.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	366.470.925
1	05	03	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Medan	100 orang	257.889.451	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 orang	260.468.345
1	05	03	2,02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Medan	50 Keluarga	128.328.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Keluarga	129.611.533

1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Medan	1 Dokumen	1.371.959.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.385.679.358
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Medan	11.510 orang	1.829.539.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.510 orang	1.135.063.383
1	05	03	2,03	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kota Medan	1 Dokumen	298.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0

1	05	03	2,03	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kota Medan	124 orang	264.237.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		124 orang	266.879.471
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
1	05	03	2,04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kota Medan	1 Dokumen	298.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	301.182.000
1	05	03	2,04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Medan	1 Dokumen	298.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	301.182.000
1	05	03	2,04	10	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kota Medan	1 Kegiatan	1.252.536.785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	4.900.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dan direncanakan anggaran sebesar Rp 25.124.821.644,- Rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut ;

b. 2 Program

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

c. 10 Kegiatan

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d. 30 Sub Kegiatan

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu diperhatikan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang Penanggualngan bencana pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kota dengan tema dan prioritas Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menterjemahkan visi dan misi yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan serta peran aktif seluruh stakeholder.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus di tingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD.
4. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Perubahan)
5. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan selanjutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan serta peran aktif seluruh stakeholder.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan
2. Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur sebagai upaya yang harus ditempuh dengan pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja apartur.

Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Medan



Yunita Saji, S.H
PEMBINA (IV/a)
NIP 197006222007012031